

## Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kejahatan Properti di Pulau Jawa Tahun 2014-2019

Aida Istihamah Effendi\*, Aan Julia

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*aidaistihamah@gmail.com, aanjulia@unisba.ac.id

**Abstract.** Crimes against property are a type of crime that rife on Java Island in 2014-2019. This condition raises the issue of development problems, that's a sense of security for the community. Sense of security disrupts the sustainable development goals or SDGs point 16: Peace, Justice and Strong Institutions. This study was conducted to determine the magnitude of the influence of several economic factors, namely the unemployment rate, the level of inequality, and cost of living of region. The analysis was used a type of quantitative descriptive research with secondary panel data, while the analysis model used the Generalized Least Square (GLS) method. Simultaneous testing shows that there is a relationship between unemployment, gini ratio and cost of living on crimes against property. The partial test shows there is a positive relationship as much as 0,13 units between unemployment and crimes against property. Cost of living shows the result is negative relationship as much as 0.65 units to crimes against property.

**Keywords:** Crimes against property, Sustainable development goals, Cost of living.

**Abstrak.** Kejahatan terhadap hak/milik tanpa kekerasan atau disebut kejahatan properti merupakan jenis kejahatan yang marak terjadi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2014-2019. Kondisi tersebut menimbulkan isu permasalahan pembangunan yaitu rasa aman bagi masyarakat. Hal tersebut mengganggu upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin ke-16, yaitu Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui besaran pengaruh beberapa faktor ekonomi, yaitu tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan, dan pengeluaran per kapita suatu wilayah terhadap angka kejahatan properti. Analisis yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan data sekunder secara panel. Sedangkan model analisis menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). Uji simultan menunjukkan adanya hubungan TPT, GR dan pengeluaran per kapita terhadap kasus kejahatan properti. Adapun uji parsial menunjukkan adanya dugaan hubungan positif TPT sebesar 0,13 satuan terhadap angka kejahatan properti. Pengeluaran per kapita menunjukkan hasil adanya dugaan hubungan negatif sebesar 0,65 satuan terhadap kasus kejahatan properti.

**Kata Kunci:** Kejahatan properti, Tujuan pembangunan berkelanjutan, Pengeluaran per kapita.

## A. Pendahuluan

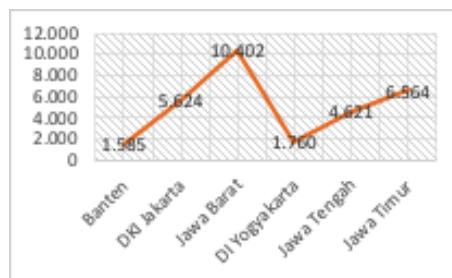
Mendapatkan rasa aman dan terlindungi dalam berbagai aspek kehidupan merupakan hak asasi setiap manusia. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Adapun bahasan dalam SDGs 2030 mengenai keamanan bersama terdapat pada poin ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat. Salah satu indikatornya membahas mengenai risiko penduduk terkena tindak pidana terhadap kasus kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate) yang dapat menurun 50% di tahun 2030 (Alisjahbana, *et al.*, 2018).

Menurut indeks kejahatan pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke 68 dari 147 negara yang terdaftar (Khairani & Ariesa, 2019). Sebagaimana diungkapkan oleh data BPS (2018) kasus kejahatan dengan tingkatan hierarki paling tinggi klasifikasinya di tingkat internasional, begitupun hukumannya, adalah kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan. Adapun kasus kejahatan yang menjadi perhatian utama Polri adalah kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan. Sedangkan kasus kejahatan dengan jumlah paling banyak setiap tahunnya adalah kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan atau kejahatan properti.

Guna mendorong pencapaian pembangunan nasional disertai pemerataan kesejahteraan, diperlukan upaya optimal terhadap penekanan angka kasus terjadinya kriminalitas. Salah satunya dalam jenis kriminalitas terhadap harta benda atau kejahatan properti. Dibutuhkan usaha bersama berupa kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, hingga dukungan positif masyarakat.

Menurut FBI, kejahatan properti merupakan tindakan pengambilan hak/milik pribadi secara sembunyi-sembunyi daripada pemaksaan, termasuk memasuki suatu bangunan secara ilegal, pencurian, dan curanmor (Sullivan, 2012). Kejahatan properti merupakan salah satu kelompok kriminalitas yang sering ditemui, diantaranya pengambilan sesuatu yang melanggar hukum seperti pencurian, perampokan, penadahan, kejahatan dengan pembakaran dan perusakan properti. Jenis kriminalitas ini, pada umumnya, dipengaruhi oleh kondisi tinggi-rendahnya kualitas dan jumlah penduduk.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau besar di Indonesia, yang menampung kurang lebih 60% dari total penduduk Indonesia. Kondisi ini menjadikan Pulau Jawa berpotensi sebagai kontributor tertinggi angka tindak pidana kejahatan. Sejalan dengan penelitian Purwanti & Widyaningsih (2019) menyebutkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap angka kriminalitas. Hal ini disebabkan dorongan untuk melakukan kejahatan umumnya didasarkan pada asas kebutuhan. Dari sisi ekonomi, dapat dijelaskan bahwa fenomena kriminalitas didasarkan pada pertimbangan perilaku individu konsumen yaitu memaksimalkan utilitas (Nugroho & Harmadi, 2015). Periode 2017 menjadi batu loncatan fluktuasi angka kejahatan properti di Pulau Jawa, dimana pada tahun tersebut menjadi tahun transisi yang ditandai dengan penurunan signifikan dalam periode 2016 hingga 2018.



Sumber: Dok. Statistika Kriminal 2018, diolah

**Gambar 1.** Kejahatan Properti di Pulau Jawa, 2017

Kejahatan properti salah satunya dipengaruhi oleh situasi masyarakat yang tidak memiliki fokus kesibukan atau menganggur (Nugroho & Harmadi, 2015). Tingkat penduduk Pulau Jawa yang tinggi menjadikan kasus pengangguran sebagai kondisi yang tidak terhindarkan, di tengah tingginya persaingan antar para pelaku ekonomi. Begitupun laju pertumbuhan ekonomi non-inklusif memunculkan kemungkinan terjadinya dorongan timpang sosial masyarakat. Adapun pengaruh lain, sebagaimana diungkapkan oleh Husnayain (2007), bahwa pemuda yang berusia 15-29 tahun berpotensi memiliki dorongan besar untuk melakukan kejahatan, dimana kondisi tersebut didorong oleh ekspektasi pemenuhan kebutuhan keluarga (Maulana, 2014).

Berdasarkan fenomena dan kondisi tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap kasus kejahatan properti di 6 Provinsi di Pulau Jawa pada periode 2014 hingga 2019. Dengan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi kejahatan properti di Pulau Jawa periode 2014-2019.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti di Pulau Jawa periode 2014-2019.
3. Menganalisa pengaruh yang terjadi antara faktor tersebut di atas terhadap tingkat kejahatan properti di Pulau Jawa periode 2014-2019.

## **B. Metodologi**

Semakin tinggi angka kriminalitas mengindikasikan semakin tingginya keresahan masyarakat setempat. Salah satu bentuk kriminalitas yang paling sering dijumpai adalah tindak pidana kejahatan properti. Menurut Separovic (1985) penyebab munculnya kejahatan dipengaruhi oleh faktor personal, faktor sosial, dan faktor situasional (Hardianto, 2009). Kasus kejahatan properti, pada umumnya, dipengaruhi oleh faktor situasional yang mendesak baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Namun tidak hanya disebabkan oleh latar belakang finansial, kondisi dan status menganggur lebih menjadi dorongan terbesar dalam melakukan kriminalitas. Brush (2007) mengungkapkan bahwa seorang individu yang menganggur secara signifikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kejahatan meskipun memiliki penghasilan yang tinggi (Purwanti & Widyaningsih, 2019). Selain itu, isu kecemburuan sosial dan biaya hidup menjadi alasan lain pendorong terjadinya kasus kriminalitas.

Dalam kajian ekonomi, fenomena tingkat kriminalitas dilihat berdasarkan potensi perilaku individu sebagai seorang konsumen. Dianalogikan kasus kejahatan properti seperti permintaan dan penawaran dalam kegiatan ekonomi (Arsono, 2014). Pelaku kejahatan berperan sebagai simbol penawaran sedangkan rumah tangga sebagai simbol permintaan. Adapun pemerintah berperan terhadap keduanya, baik secara langsung (permintaan) maupun tidak langsung (penawaran).

Sebagaimana diungkapkan oleh Arsono (2014) mengenai General Strain Theory oleh Robert Agnews, yang menjelaskan bahwa adanya ekspektasi kesuksesan yang sifatnya subjektif menjadi tolak ukur masing-masing individu dan cenderung mengalami frustrasi apabila tidak berhasil memenuhinya. Adapun Teori Anomie yang diungkapkan seorang sarjana sosiologi asal Perancis, Emil Durkheim (Fauziah, 2019), yang menyatakan bahwa hasrat manusia tidak terbatas sehingga mendorong setiap individu untuk memiliki standar ekonomi yang realistis. Menurutnya penyebab tingkat kriminalitas tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi mikro, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, data pengujian yang digunakan terdiri atas beberapa variabel independen, yaitu tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan pengeluaran per kapita sebagai proksi atas variabel biaya hidup. Sedangkan, variabel dependen merupakan data resmi terlaporkannya jumlah kasus kejahatan properti di Pulau Jawa pada periode 2014-2019.

**Tabel 1.** Kejahatan Properti (Kasus) di Pulau Jawa, 2014-2019

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banten	2.955	2.272	1.833	1.585	1.566	1.366
DKI Jakarta	9.882	8.870	8.254	5.624	4.349	3.307
Jawa Barat	11.620	9.984	10.227	10.402	4.841	3.421
DI Yogyakarta	1.983	2.220	2.112	1.760	1.643	1.715
Jawa Tengah	5.671	6.124	5.502	4.621	3.727	4.265
Jawa Timur	2.973	6.300	6.994	6.564	7.090	6.929
<b>Pulau Jawa</b>	<b>35.084</b>	<b>35.770</b>	<b>34.922</b>	<b>30.556</b>	<b>23.216</b>	<b>21.003</b>

Sumber: Statistik Kriminal, Badan Pusat Statistik

Adapun model regresi penelitian dilakukan menggunakan pendekatan GLS (*Generalized Least Square*) atau OLS (*Ordinary Least Square*), tergantung pada hasil terbaik atas Uji Chow, Uji Hausman, dan LM Test, jika diperlukan. Dalam penggunaan OLS, uji asumsi klasik yang perlu dilakukan hanya terdiri atas autokorelasi dan heteroskedastis. Sedangkan, dalam penggunaan model GLS uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan.

### C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, maka *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model prediktor terbaik dalam penelitian. REM yang tergolong model GLS, dalam penelitian menggunakan data panel, maka tidak perlu dikenakan uji asumsi klasik guna memenuhi syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*). Dengan menggunakan EViews 7, dihasilkan model regresi sebagai mana tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2.** Hasil Estimasi *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.12324	6.613281	2.438009	0.0205
TPT	0.127139	0.108298	1.173979	0.2491
GR	1.123763	3.968428	0.283176	0.7789
Log(PpK)	-0.648625	0.402843	-1.610119	0.1172

Sumber: Hasil Estimasi Model menggunakan Eviews 7, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dinyatakan kasus kejahatan properti bertambah sebesar 16,12 kasus meskipun tanpa adanya pengaruh dari ketiga variabel bebas yang digunakan. Adapun persamaan penelitian yang dihasilkan sebagai berikut.

$$Y_{it} = 16,12 + 0,13X_{1it} + 1,12X_{2it} - 0,65X_{3it}$$

Variabel tingkat pengangguran menunjukkan angka 0,2491. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kejahatan properti pada taraf nyata di atas 24,91%. Kondisi ini menentukan besarnya tingkat keyakinan atas pengaruh sebesar 75,09%. Angka tersebut cukup besar untuk menduga adanya pengaruh signifikan antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kejahatan properti pada alpha kisaran 24,91%. Berdasarkan persamaan yang dihasilkan, secara statistik menunjukkan jumlah kejahatan properti akan bertambah sebesar 0,13 kasus setiap kali bertambahnya kasus pengangguran sebanyak 1 persen. Hasil pengujian menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pengangguran terbuka terhadap angka kejahatan properti di Pulau Jawa.

Hal tersebut sejalan dengan data yang ditampilkan pada mayoritas provinsi di Pulau Jawa. Namun, Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta yang menunjukkan hasil yang berbeda. Kedua provinsi tersebut cenderung menunjukkan adanya hubungan negatif antara angka pengangguran dengan kasus kejahatan properti. Hal tersebut didukung oleh kondisi jenis pengangguran yang mendominasi merupakan pengangguran terdidik atau pengangguran terselubung (*disguised unemployment*). Hal ini sesuai dengan ungkapan, dimana seseorang yang menganggur tidak seketika memiliki pemikiran untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum (Audey & Ariusni, 2019).

Persamaan yang digunakan dalam penelitian menunjukkan pertambahan kasus kejahatan properti sebesar 1,12 kejadian setiap bertambahnya angka ketimpangan sebesar 1 satuan. Adapun variabel tingkat ketimpangan, menunjukkan angka probabilitas sebesar 0,7789. Artinya tingkat ketimpangan baru akan berpengaruh terhadap angka kejahatan properti pada tingkat taraf nyata di atas 77,89%. Yang mana kondisi tersebut memproyeksikan besarnya tingkat keyakinan atas pengaruh yang terjadi sebesar 22,11%. Angka tersebut menunjukkan tingkat keyakinan yang terlalu rendah dan mengindikasikan terjadinya keraguan-raguan. Sehingga dapat diyakini kemungkinan besar tingkat ketimpangan atau *gini ratio* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kejahatan properti di Pulau Jawa.

Terbukti pada data mayoritas provinsi di Pulau Jawa yang tidak sesuai dengan hasil regresi. Namun berbeda dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta, yang menunjukkan kesesuaian optimal. Tingkat ketimpangan erat kaitannya dengan kemiskinan. Sebagaimana Provinsi Banten merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa (Ginjar, Setyadi, & Suiroh, 2018). Sehingga dapat diasumsikan penduduknya mampu memenuhi kebutuhan dasar atas hidup dan memiliki hubungan positif yang mampu menekan angka kejahatan properti.

Kemudian variabel beban biaya hidup, dari sisi pengeluaran, menunjukkan angka probabilitas sebesar 0,1172. Angka tersebut menjelaskan bahwa biaya hidup berpengaruh terhadap tingkat kejahatan properti pada taraf nyata di atas 11,72%. Kondisi ini memproyeksikan tingkat keyakinan atas pengaruh yang terjadi sebesar 88,28%. Sehingga dapat diyakini adanya dugaan bahwa biaya hidup memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kejahatan properti di Pulau Jawa pada alpha kisaran 11,72%. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan menggambarkan adanya hubungan negatif antara pertambahan tingkat pengeluaran per kapita dengan angka kejahatan properti, ditandai dengan pengurangan kasus sebesar 0,65 satuan kasus setiap kali bertambahnya jumlah pengeluaran sebesar 1 persen.

Hal tersebut sesuai dengan data mayoritas wilayah di Pulau Jawa. Namun Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang berbeda. Provinsi tersebut cenderung menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pengeluaran per kapita dengan kasus kejahatan properti. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki potensi kecenderungan dilakukannya aksi kejahatan properti di tengah kepadatan penduduk. Kondisi ini, menurut Nugroho & Harmadi (2015), dimungkinkan oleh situasi spasial yang mana menimbulkan ketertarikan para pelaku dalam menjalankan aksinya, sebab dorongan antar wilayah yang berada di sekitar tempat tinggalnya.

**Tabel 3.** Hasil Estimasi Lanjutan

Weighted Statistics	
R-squared	0.240142
Adjusted R-squared	0.168906
F-statistic	3.371050
Prob(F-statistic)	0.030368
S.E. of regression	0.295327
S.D. dependent variabel	0.323950

Sumber: Hasil Estimasi Model menggunakan Eviews 7, 2021

Berdasarkan hasil regresi data menunjukkan besarnya probabilitas terhadap uji F sebesar 0,03. Angka tersebut menjelaskan adanya pengaruh variabel independen, secara simultan, terhadap variabel dependen pada taraf nyata di atas 3%. Kondisi ini memproyeksikan besarnya tingkat keyakinan atas pengaruh yang dapat terjadi sebesar 97%. Nilai tersebut sangat besar untuk menjelaskan bahwa setiap variabel independen yang digunakan dalam persamaan berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Adapun besarnya nilai R-squared dalam model regresi yang digunakan sebesar 0,24. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap Y sebesar 24%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian kali ini. Besarnya nilai standar error dalam persamaan yang digunakan, yang ditunjukkan oleh tabel *S.E. of regression*, senilai 0,295. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan nilai standar deviasi, yang ditunjukkan oleh tabel *S.D. dependent variabel*, sebesar 0,324. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa model regresi yang digunakan *valid* sebagai model prediktor dalam penelitian.

#### D. Kesimpulan

Sebagaimana hasil pembahasan atas pengujian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti:

1. Angka kejahatan properti di Pulau Jawa memiliki andil yang cukup signifikan dalam skala nasional. Meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya, namun kejahatan properti tetap memimpin sebagai salah satu bentuk kriminalitas dengan jumlah kasus terbanyak dibandingkan jenis kejahatan lainnya.
2. Berdasarkan variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian kali ini, masing-masing variabel menunjukkan hubungan dan pengaruh yang berbeda-beda, namun memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kejahatan properti di Pulau Jawa. Tingkat pengangguran terbuka dan biaya hidup atas pengeluaran per kapita memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap angka kejahatan properti. Sedangkan rasio gini atau angka ketimpangan diduga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kasus tindak pidana properti.
3. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kejahatan properti di Pulau Jawa tahun 2014-2019. Adapun biaya hidup yang digambarkan melalui pengeluaran per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap angka kejahatan properti di Pulau Jawa. Sedangkan gini ratio diduga tidak berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan positif terhadap tingkat kejahatan properti di Pulau Jawa tahun 2014-2019.
4. Faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti di Pulau Jawa tidak hanya ekonomi, adapun faktor sosial, hukum, dan kependudukan yang turut mempengaruhi tinggi-rendahnya kasus kejahatan properti. Hal ini didukung oleh kondisi kependudukan Pulau Jawa yang padat dan bersifat heterogen.

#### Daftar Pustaka

- [1] Alisjahbana, A. S., Yusuf, A. A., Anna, Z., Hadisoemarto, P. F., Kadarisman, A., Maulana, N., . . . Megananda. (2018). *Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- [2] Arsono, Y. D. (2014). Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, dan Jumlah Polisi Perkapita terhadap Angka Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012.
- [3] Audey, R. P., & Ariusni. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 653-666.
- [4] BPS: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. (2015). *Statistik Kriminal 2015*. Jakarta: BPS RI.
- [6] BPS: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. (2016). *Statistik Kriminal 2016*. Jakarta: BPS RI.
- [7] BPS: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. (2017). *Statistik Kriminal 2017*. Jakarta: BPS RI.
- [8] BPS: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. (2018). *Statistik Kriminal 2018*. Jakarta: BPS RI.

- [9] BPS: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. (2019). Statistik Kriminal 2019. Jakarta: BPS RI.
- [10] BPS: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. (2020). Statistik Kriminal 2020. Jakarta: BPS RI.
- [11] Fauziah, R. (2019). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Disparitas Pendapatan, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kriminalitas Properti di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. *Jurnal Ilmiah*.
- [12] Ginanjar, R. F., Setyadi, S., & Suiroh, U. (2018, Oktober). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 227-248.
- [13] Hardianto, F. N. (2009, Agustus). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 13(2).
- [14] Khairani, R., & Ariesa, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- [15] Maulana, T. (2014). Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, dan Jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian dengan Pendekatan Ekonomi.
- [16] Nugroho, A. H., & Harmadi, S. H. (2015, Januari). Analisis Spasial Kriminalitas Harta Benda di Wilayah Jadedetabek: Spatial Analysis on Property Crime in Jadedetabek. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(2).
- [17] Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi-QU (Jurnal Ilmu Ekonomi)*.
- [18] Sullivan, A. O. (2012). *Urban Economics: Eighth Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- [19] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Indonesia.